



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI**

Jalan Kramat Raya Nomor 132, Jakarta Pusat, Telepon (021) 3927857, 3923445
Website: <https://bskdn.kemendagri.go.id/>, email: bskdn@kemendagri.go.id

20 Oktober 2025

Nomor : 000.10/4282/BSKDN
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Permohonan Narasumber

Yth. Ir. Gunawan Pria Utama, M.Kom, MCE
Pusat Kajian Analisis Data Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur

Dalam rangka memperkuat peran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mewujudkan integrasi data melalui program BSKDN Satu Data, dengan hormat kami disampaikan bahwa akan dilaksanakan kegiatan pada:

hari : Kamis
tanggal : 23 Oktober 2025
waktu : 09.30 WIB s.d selesai
tempat : Ruang Rapat *Command Center* Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
acara : *Focus Group Discussion* Penyusunan Peta Jalan SPBE dalam rangka BSKDN Satu Data dan *Dashboard* Data Terintegrasi

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan bapak untuk hadir secara langsung menjadi pemateri pada kegiatan dimaksud dengan tema: **Identifikasi Awal Peta Rencana SPBE dan BSKDN Satu Data** (Arsitektur SPBE BSKDN dan *Dashboard* Data Terintegrasi: Desain, Interoperabilitas, dan Tata Kelola Data). Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Adi Nugraha dengan nomor HP. 085697588506.

Demikian untuk maklum dan atas kerja samanya dihaturkan terima kasih.

Sekretaris Badan
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,



Dr. Noudy R. P. Tendean, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196711071989021003

Tembusan:
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.



TERM OF REFERENCE (ToR)

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

**PENYUSUNAN PETA JALAN SPBE DALAM RANGKA
BSKDN SATU DATA DAN *DASHBOARD* DATA TERINTEGRASI**

**Kamis, 23 Oktober 2025
Ruang *Command Center* BSKDN Kementerian Dalam Negeri
Jalan Kramat Raya No. 132**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

TERM OF REFERENCE (ToR)
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENYUSUNAN PETA JALAN SPBE DALAM RANGKA
BSKDN SATU DATA DAN DASHBOARD DATA TERINTEGRASI

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan era digital melalui penerapan sistem kerja yang efisien, transparan, dan berbasis data. Pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan transformasi digital sektor publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi. Melalui SPBE, penyelenggaraan administrasi pemerintahan diharapkan tidak lagi bersifat sektoral dan manual, tetapi saling terhubung antar unit kerja serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas. Implementasi SPBE juga menjadi bagian penting dari agenda Reformasi Birokrasi Digital, yang menekankan pentingnya integrasi data, sistem, dan proses bisnis antar instansi pemerintah.

Pada lingkungan Kementerian Dalam Negeri, penerapan SPBE menjadi instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Sebagai salah satu unit kerja strategis, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memiliki mandat penting untuk menghasilkan kebijakan strategis berbasis bukti dan data. Dalam pelaksanaannya, BSKDN memerlukan sistem pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi antar pusat strategi kebijakan dan unit pendukung lainnya, agar dapat mendukung proses penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan secara efektif.

Namun, kondisi eksisting menunjukkan bahwa pengelolaan data di lingkungan BSKDN masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Fragmentasi data antar unit kerja, di mana setiap pusat strategi dan bagian memiliki sistem atau format data yang berbeda-beda.
2. Kurangnya integrasi antar aplikasi dan sistem informasi, sehingga proses pengumpulan dan analisis data sering kali memakan waktu lama.
3. Keterbatasan dalam pemanfaatan data secara real-time, baik untuk pengambilan keputusan pimpinan maupun untuk penyusunan rekomendasi kebijakan strategis.
4. Belum adanya peta jalan SPBE yang secara jelas mengarahkan tahapan pengembangan sistem digitalisasi kelembagaan BSKDN dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BSKDN bermaksud menyusun peta rencana SPBE sebagai acuan tata kelola SPBE yang berkelanjutan di BSKDN, serta menggagas pengembangan “BSKDN Satu Data”, yaitu suatu sistem pengelolaan data terintegrasi yang berfungsi sebagai *dashboard* pusat informasi strategis. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan data lintas unit kerja, menampilkan indikator kinerja utama secara *real-time*, dan memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi kebijakan berbasis data.

Agar inisiatif tersebut dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan, diperlukan dokumen perencanaan strategis berupa Peta Jalan SPBE dan BSKDN Satu Data, yang berfungsi sebagai panduan arah pengembangan sistem digitalisasi kelembagaan. Peta jalan ini akan menguraikan visi, sasaran strategis, tahapan implementasi, kebutuhan infrastruktur, serta tata kelola dan keamanan data yang sesuai dengan standar nasional.

Penyusunan peta jalan tersebut tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan BSKDN secara kolaboratif. Adapun terkait hal tersebut, diperlukan forum bersama untuk menyamakan persepsi, menyusun rencana terukur, dan memastikan keselarasan arah kebijakan dengan kerangka SPBE Nasional dan Kebijakan Satu Data Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019).

Oleh karena itu, BSKDN memandang perlu untuk melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Peta Jalan SPBE dalam rangka BSKDN Satu Data dan *Dashboard* Data Terintegrasi sebagai langkah awal dalam membangun komitmen bersama antar unit kerja. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi teknis, pembelajaran kebijakan, serta forum diskusi lintas bidang guna menghasilkan rancangan peta jalan SPBE dan BSKDN Satu

Data yang komprehensif dan aplikatif. Dalam kegiatan tersebut juga dibahas berbagai peluang dan tantangan SPBE seiring perkembangan teknologi global, dimana arah transformasi digital di lingkup pemerintahan juga dihadapkan dengan kemajuan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan *era Singularity*. Dalam konteks ini, penerapan SPBE bukan hanya sebatas digitalisasi proses administrasi, tetapi juga langkah menuju integrasi kecerdasan data dan otomatisasi pengambilan keputusan berbasis analisis real-time.

Kegiatan ini diharapkan menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi antarunit kerja BSKDN, memperkuat kapasitas digital aparatur, serta merumuskan langkah-langkah konkret penyusunan peta jalan SPBE dan BSKDN Satu Data yang selaras dengan arsitektur SPBE Nasional dan kebijakan Satu Data Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019). Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang evolusi e-Government menuju pemerintahan digital cerdas, sekaligus menyiapkan arsitektur data terintegrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI di masa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan SPBE dalam rangka BSKDN Satu Data dan *Dashboard* Data Terintegrasi ini dimaksudkan sebagai forum koordinasi, pembelajaran, dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam menyusun arah kebijakan, strategi, serta langkah implementasi pengembangan sistem digital dan integrasi data di lingkungan BSKDN. Melalui kegiatan ini, seluruh unit kerja juga diharapkan memiliki kesamaan persepsi terhadap pentingnya transformasi digital kelembagaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan *era Singularity*, serta memahami posisi strategis BSKDN dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data dan kecerdasan digital.

2. Tujuan

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman konseptual peserta mengenai prinsip, kebijakan, arah pengembangan dan peran strategis SPBE secara nasional. Serta meningkatkan pemahaman konseptual peserta mengenai evolusi e-

Government menuju *Smart Governance*, termasuk arah pengembangan SPBE nasional yang berorientasi pada penerapan AI dan sistem pemerintahan cerdas di masa depan.

- b. Memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kebijakan, peta jalan dan arsitektur SPBE lingkup Kementerian Dalam Negeri, termasuk strategi integrasi data antarunit kerja dan penguatan tata kelola digital secara menyeluruh.
- c. Mengidentifikasi kondisi eksisting, kebutuhan, dan tantangan penerapan SPBE di lingkungan BSKDN, serta merumuskan arah dan tahapan pengembangan peta jalan SPBE BSKDN yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.
- d. Mendorong kolaborasi antar unit kerja BSKDN dalam membangun ekosistem data terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis berbasis bukti.
- e. Menyusun rencana tindak lanjut (*action plan*) penyusunan peta jalan SPBE dan pengembangan dashboard data terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan di tahap berikutnya.

C. SASARAN

1. Meningkatnya pemahaman aparatur BSKDN terhadap konsep, kebijakan, dan praktik terbaik implementasi SPBE di tingkat nasional dan lingkup Kementerian Dalam Negeri, serta pemahaman terhadap konsep e-Government dan transformasi SPBE yang mengarah pada pemanfaatan AI, data analitik, dan otomatisasi proses pengambilan keputusan.
2. Tersusunnya rancangan awal peta jalan SPBE BSKDN, yang memuat arah kebijakan, tahapan implementasi, dan kebutuhan penguatan infrastruktur digital kelembagaan.;
3. Teridentifikasinya kondisi eksisting dan kebutuhan strategis pengelolaan data di lingkungan BSKDN, termasuk potensi integrasi data lintas unit kerja, lintas komponen, ataupun lintas sektoral melalui sistem BSKDN Satu Data.
4. Terbangunnya komitmen kolaboratif antarunit kerja BSKDN untuk mendukung pengembangan sistem data terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
5. Tersusunnya rekomendasi dan rencana tindak lanjut (*action plan*) penyusunan peta jalan SPBE dan BSKDN Satu Data yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional, kebijakan Satu Data Indonesia, serta arah transformasi digital Kemendagri.

D. PENERIMA MANFAAT

1. Penerima Manfaat Utama

- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan data, sistem informasi, serta transformasi digital kelembagaan. Kegiatan ini diharapkan memperkuat peran BSKDN sebagai *policy think tank* Kementerian Dalam Negeri yang menghasilkan kebijakan berbasis data dan analisis strategis
- Seluruh unit kerja di lingkungan BSKDN, baik Sekretariat Badan maupun empat Pusat Strategi Kebijakan, yang akan memperoleh pemahaman komprehensif tentang arah pengembangan SPBE, sekaligus memiliki panduan awal untuk mengintegrasikan sistem data dan informasi dalam lingkup masing-masing.

2. Penerima Manfaat Tidak Langsung

- Kementerian Dalam Negeri, melalui penguatan implementasi SPBE secara menyeluruh dan terkoordinasi, khususnya dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan digitalisasi pelayanan publik internal Kemendagri.
- Pemerintah Daerah, yang akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas data, informasi, serta kebijakan strategis yang bersumber dari sistem data dan analisis terintegrasi BSKDN.
- Masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal, secara tidak langsung akan menerima dampak positif dari peningkatan efektivitas kebijakan berbasis data dan transparansi tata kelola pemerintahan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang akan dilakukan dalam kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Peta Jalan SPBE dalam rangka BSKDN Satu Data dan *Dashboard* Data Terintegrasi antara lain adalah:

1. Pemaparan konsep dan arah kebijakan SPBE secara makro, termasuk landasan hukum, prinsip dasar, dan tujuan strategis transformasi digital pemerintahan di Indonesia.
2. Pemaparan arah perkembangan e-Government menuju era *AI Governance* dan *Singularity*, serta implikasinya terhadap kebijakan transformasi digital di sektor publik.
3. Pemetaan kondisi eksisting (*baseline study*) terkait sistem informasi, data, dan aplikasi yang telah digunakan di lingkungan BSKDN;

4. Analisis kebutuhan dan kesenjangan (gap analysis) dalam penerapan SPBE dan pengelolaan data;
5. Pembahasan pengembangan “BSKDN Satu Data”, sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sistem pengelolaan data kelembagaan yang terintegrasi, terstandar, dan interoperabel antar-pusat strategi kebijakan, mencakup:
 - Konsep dan arsitektur BSKDN Satu Data sebagai bagian dari implementasi SPBE;
 - Identifikasi jenis data strategis (data pokok dan data pendukung) yang dikelola oleh tiap pusat dan bagian;
 - Mekanisme integrasi data menuju dashboard BSKDN Satu Data;
 - Strategi tata kelola dan keamanan data sesuai kebijakan nasional Satu Data Indonesia.
6. Perumusan rencana tindak lanjut dan komitmen bersama untuk implementasi hasil workshop.

F. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan interaktif, sehingga seluruh peserta dapat berkontribusi secara aktif. Metode pelaksanaan terdiri dari 3 sesi inti meliputi:

1. Pemaparan tentang Arah Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada sesi ini dijelaskan konsep dan kerangka besar SPBE secara makro, mencakup prinsip integrasi digital, tata kelola data pemerintah, serta arah transformasi birokrasi digital di tingkat nasional. Sesi pemaparan ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap dasar konseptual dan arah kebijakan nasional SPBE sebagai landasan penyusunan peta jalan BSKDN.
2. Pemaparan tentang Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Kemendagri

Pada sesi ini dijelaskan peta jalan SPBE lingkup Kementerian Dalam Negeri, strategi implementasi arsitektur SPBE Kemendagri, dan mekanisme koordinasi antar-unit kerja. Proses ini bertujuan untuk memberikan referensi dan praktik baik (*best practice*) yang dapat dijadikan acuan dalam merancang peta jalan SPBE dan BSKDN Satu Data. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam penyusunan peta jalan SPBE.

3. Pemaparan tentang Identifikasi Awal Peta Rencana BSKDN dan Strategi BSKDN Satu Data

Pada sesi ini dibahas hasil identifikasi awal peta rencana SPBE BSKDN, termasuk pemetaan sistem informasi yang telah ada, analisis kebutuhan integrasi data, serta rencana pengembangan dashboard BSKDN Satu Data. Pada sesi ini juga dilakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap data dan informasi yang dikelola oleh setiap unit kerja di lingkungan BSKDN. Proses ini bertujuan untuk memetakan kondisi eksisting sistem data, menemukan potensi duplikasi atau ketidakterpaduan, serta mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan integrasi data lintas pusat dan bagian.

G. PESERTA

Peserta kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* ini, antara lain terdiri dari:

1. Ketua Tim SPBE BSKDN;
2. Perwakilan Seluruh Bagian Pada Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN);
3. Perwakilan Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri;
4. Perwakilan Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri;
5. Perwakilan Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Kemendagri;
6. Perwakilan Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri;
7. Seluruh Tim SPBE dan BSKDN Satu Data.

H. NARASUMBER

Untuk memperkaya substansi dan hasil diskusi, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan SPBE dalam rangka BSKDN Satu Data dan *Dashboard* Data Terintegrasi menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang kebijakan digital pemerintahan dan sistem informasi pemerintahan, yaitu:

1. **Dr. Rudiarto Sumarwono, M.** (Dosen Universitas Indonesia)

- Membahas konsep dan arah kebijakan SPBE secara makro, termasuk prinsip integrasi pemerintahan digital, kebijakan transformasi birokrasi digital, dan pentingnya pengelolaan data terintegrasi sebagai dasar tata kelola pemerintahan modern.
- Memberikan kerangka konseptual bagi peserta untuk memahami posisi strategis SPBE dalam konteks reformasi birokrasi nasional.
- Membahas peluang dan tantangan kebijakan SPBE menuju era kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan *Singularity*.
- Menjelaskan paradigma pemerintahan digital adaptif yang berorientasi pada efisiensi, kolaborasi lintas sektor, dan otomatisasi pengambilan keputusan berbasis data.

2. **Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri**

- Menjelaskan peta jalan SPBE lingkup Kementerian Dalam Negeri, termasuk arsitektur SPBE Kemendagri, mekanisme integrasi antarunit kerja, serta strategi penerapan Satu Data Indonesia di lingkungan Kemendagri.
- Menyampaikan praktik baik (*best practices*) dan arah pengembangan kebijakan SPBE Kemendagri yang dapat diadaptasi oleh BSKDN.

3. **Ir. Gunawan Pria Utama, M.Kom, MCE** (*Dosen Tetap Universitas Budi Luhur Jakarta*)

- Memaparkan hasil identifikasi awal peta rencana SPBE di lingkungan BSKDN, meliputi pemetaan sistem informasi eksisting, analisis kebutuhan, serta rancangan awal pengembangan dashboard BSKDN Satu Data.
- Menyajikan desain dan arsitektur SPBE BSKDN menuju dashboard data terintegrasi, termasuk pemetaan sistem eksisting, rancangan interoperabilitas antarunit kerja, serta strategi pengelolaan data yang efisien dan aman.
- Memberikan panduan teknis tentang bagaimana integrasi data dapat mendukung analitik kebijakan dan pemantauan kinerja berbasis bukti.

I. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari, tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang *Command Center* BSKDN Kementerian Dalam Negeri

J. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan dari kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Peta Jalan SPBE dalam rangka BSKDN Satu Data dan *Dashboard* Data Terintegrasi ini berasal dari APBN Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Tahun Anggaran 2025.

K. PENUTUP

Demikian *Term of Reference* (ToR) kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) ini disusun untuk kebutuhan pembahasan kegiatan secara lebih lanjut dan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rundown Kegiatan FGD
PENYUSUNAN PETA JALAN SPBE DALAM RANGKA
BSKDN SATU DATA DAN DASHBOARD DATA TERINTEGRASI
Kamis, 23 Oktober 2025
Ruang Command Center BSKDN
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta

Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara
09.00 – 09.30 WIB	Registrasi Peserta	Tim Administrasi
09.30 – 09.35 WIB	Pembukaan 1. Mendengarkan lagu Indonesia Raya 2. Membaca Doa	MC/Panitia
09.35 – 10.00 WIB	Sambutan dan Arahan Kepala BSKDN	Kepala BSKDN
10.00 – 10.30 WIB	Sesi I: Konsep dan Arah Kebijakan SPBE Nasional (Landasan konseptual SPBE dan Transformasi <i>e-Government</i> menuju <i>Smart Governance</i> berbasis <i>AI</i> dan <i>era Singularity</i>)	Narasumber: Dr. Rudiarto Sumarwono, SIA, M.M Dosen Universitas Indonesia
10.30 – 10.50 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab Materi I	Moderator
10.50 – 10.55 WIB	Game Interaktif (Kuis 1)	Panitia
10.55 – 11.25 WIB	Sesi II: Peta Jalan SPBE Lingkup Kementerian Dalam Negeri (Arsitektur SPBE Kemendagri dan integrasi antar unit kerja)	Narasumber: Kepala Pusdatin
11.25 – 11.45 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab Materi II	Moderator
11.45 – 11.50 WIB	Game Interaktif (Kuis 2)	Panitia
11.50 – 13.15 WIB	ISHOMA	
13.15 – 13.45 WIB	Sesi III: Identifikasi Awal Peta Rencana SPBE dan BSKDN Satu Data (Arsitektur SPBE BSKDN dan Dashboard Data Terintegrasi: Desain, Interoperabilitas, dan Tata Kelola Data)	Narasumber: Ir. Gunawan Pria Utama, M.Kom, MCE Dosen Universitas Budi Luhur

Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara
13.45 – 14.30 WIB	Tanya Jawab Perumusan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan) (Identifikasi kebutuhan, pembagian peran, dan tahapan penyusunan peta jalan SPBE dan BSKDN Satu Data)	Tim SPBE BSKDN & Seluruh Peserta
14.30 – 14.35 WIB	Game Interaktif (Kuis 3)	Panitia
14.35 – 14.45 WIB	Penutupan	Kepala Bagian Perencanaan

*Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah



Diskusi

Penyusunan Peta Jalan SPBE dalam rangka BSKDN Satu Data dan Dashboard Data Terintegrasi

Oleh :

Ir. Gunawan Pria Utama, M.Kom, MCE

Kamis 23 Oktober 2025





Kedudukan dan Tugas BSKDN

Dasar: Pasal 693–694 , Permendagri No. 9 Tahun 2025

Kedudukan: BSKDN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Menteri Dalam Negeri**, dipimpin oleh **Kepala Badan**.

Tugas Utama:

“Menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.”

Makna strategis:

BSKDN berperan sebagai *think-tank* internal Kemendagri yang berfungsi menghasilkan kebijakan strategis berbasis analisis untuk mendukung arah pemerintahan daerah dan pembangunan nasional.



Fungsi BSKDN

Dasar: Pasal 695 , Permendagri No. 9 Tahun 2025

BSKDN memiliki fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis kebijakan;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Analisis Strategis:

Fungsi-fungsi ini mencerminkan siklus kebijakan penuh — mulai dari **perumusan, analisis, koordinasi, evaluasi**, hingga **pelaporan** — yang sangat relevan untuk mendukung penerapan SPBE karena berorientasi pada integrasi data, tata kelola digital, dan peningkatan efisiensi kebijakan publik

Struktur Organisasi BSKDN dan Kaitan SPBE



Dasar: Pasal 696 dan Lampiran Struktur, Permendagri No. 9 Tahun 2025

BSKDN terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Strategi Kebijakan Otonomi Daerah, Politik Pemerintahan Umum, dan Hukum;
- c. Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik;
- d. Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa;
- e. Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri.

Integrasi SPBE sangat erat dengan poin (e), karena pusat tersebut memiliki mandat langsung untuk:

- Menyusun kebijakan dan strategi digitalisasi pemerintahan.
- Melakukan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
- Mengelola data dan pelaporan inovasi daerah.

(Sumber: Pasal 723–724, Permendagri No. 9 Tahun 2025)



Integrasi BSKDN dengan SPBE

Integrasi antara BSKDN dan SPBE dapat dijelaskan melalui tiga dimensi strategis:

1. Dimensi Tata Kelola (Governance)

- BSKDN berperan dalam koordinasi kebijakan antarunit di Kemendagri yang diatur dalam Pasal 803–807 mengenai prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan interoperabilitas data (Permendagri No. 9 Tahun 2025)
- SPBE membutuhkan tata kelola lintas fungsi yang sejalan dengan peran BSKDN sebagai penggerak strategi kebijakan digital.

2. Dimensi Data dan Informasi

- Sekretariat BSKDN bertugas mengelola data, informasi, evaluasi kinerja, dan sistem pengendalian intern pemerintah (Pasal 700–701, Permendagri No. 9 Tahun 2025)
- Fungsi ini mendukung interoperabilitas dan data-driven decision making sebagai prinsip utama SPBE.

3. Dimensi Inovasi dan SDM

- Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi memfokuskan diri pada peningkatan kompetensi ASN dan implementasi inovasi digital.
- Ini selaras dengan Domain Arsitektur SPBE bidang Layanan Pemerintahan Digital dan Tata Kelola SDM Aparatur.

Analisis Integratif



Aspek Strategis	Peran BSKDN	Keterkaitan SPBE
Kebijakan dan Strategi	Menyusun rekomendasi kebijakan pemerintahan dalam negeri	Integrasi kebijakan digital dan penyusunan arsitektur SPBE
Koordinasi Lintas Bidang	Sinkronisasi antar sektor pemerintahan daerah dan pusat	Menguatkan interoperabilitas data antar instansi
Data dan Evaluasi Kinerja	Mengelola data, pelaporan, dan evaluasi kinerja	Mendukung dashboard SPBE dan indikator kinerja digital
Pengembangan SDM dan Inovasi	Pembinaan SDM dan inovasi pemerintahan	Implementasi domain Manajemen Perubahan dan SDM Digital dalam SPBE
Digitalisasi Pemerintahan	Fokus khusus pada digitalisasi dan inovasi	Elemen inti arsitektur SPBE nasional

Tujuan Strategis



Visi BSKDN dalam konteks SPBE:

“Menjadi pusat strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri yang adaptif, inovatif, dan berbasis data digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan terpercaya.”

Empat Perspektif Balanced Scorecard (BSC)



Perspektif	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja (KPI)	Inisiatif Strategis
1. Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan (Learning & Growth)	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kapasitas SDM aparatur BSKDN dan daerah dalam analisis kebijakan digital.Membangun budaya kerja berbasis data dan inovasi.	<ul style="list-style-type: none">% ASN tersertifikasi kompetensi SPBE / Data Analyst.Indeks Budaya Inovasi Internal BSKDN.	<ul style="list-style-type: none">Program Digital Policy Academy.Knowledge Management System (KMS) berbasis SPBEPenetapan Innovation Champion per unit kerja.
2. Perspektif Proses Internal (Internal Business Process)	<ul style="list-style-type: none">Mengintegrasikan proses analisis kebijakan, data, dan evaluasi berbasis digital.Mengembangkan interoperabilitas sistem antar unit dan daerah.Menerapkan tata kelola kebijakan digital (Digital Governance).	<ul style="list-style-type: none">% integrasi aplikasi kebijakan dengan arsitektur SPBE Kemendagri.Waktu rata-rata pengolahan data kebijakan.Indeks Kematangan Proses SPBE di BSKDN.	<ul style="list-style-type: none">Penerapan Policy Intelligence Platform.Pembentukan Center for Data Governance.Integrasi database lintas Ditjen dan Pemda (melalui Satu Data Indonesia).

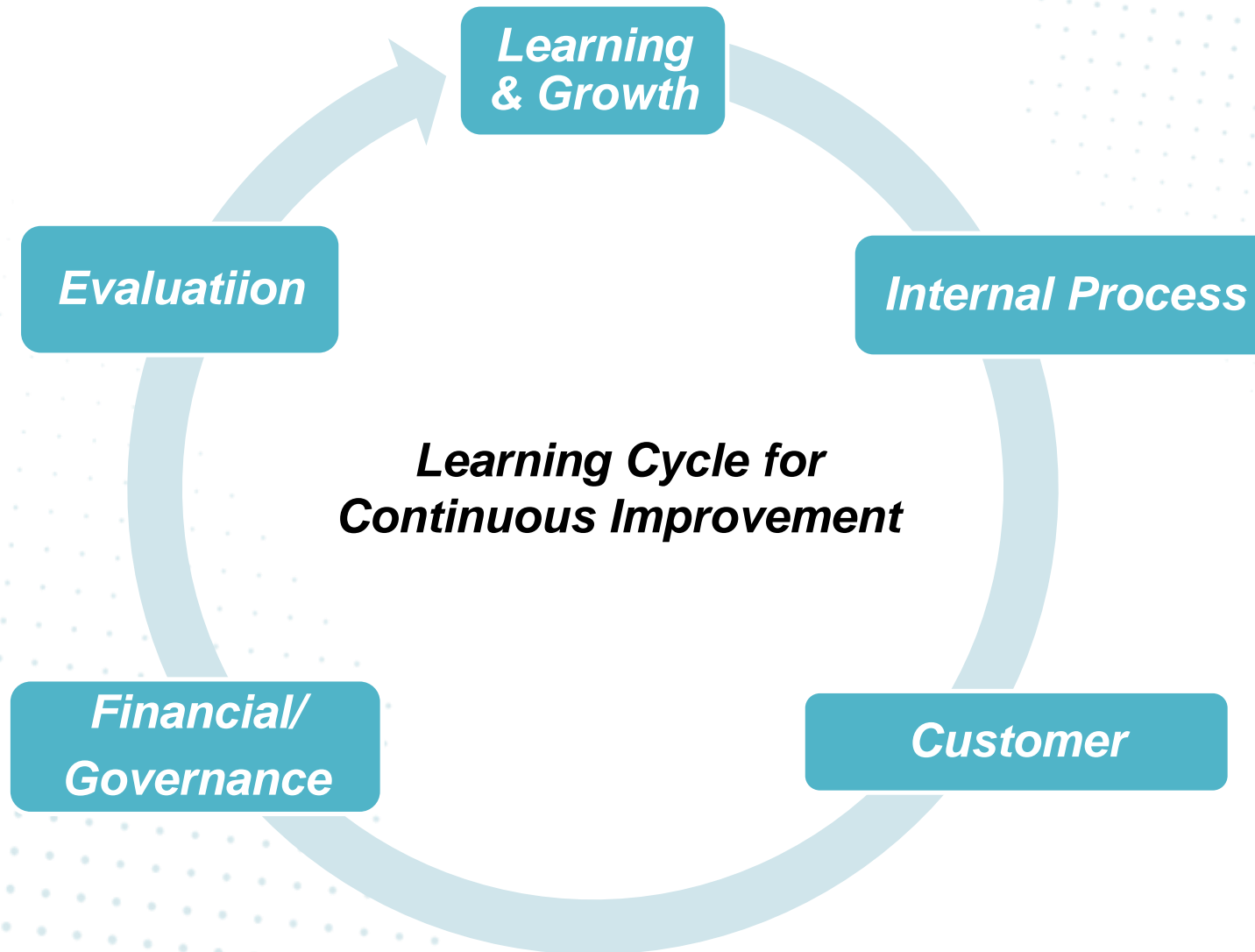
Empat Perspektif Balanced Scorecard (BSC)



Perspektif	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja (KPI)	Inisiatif Strategis
3. Perspektif Pengguna/Layanan (Customer)	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas layanan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis digital.• Memperluas akses pemda terhadap hasil analisis dan rekomendasi kebijakan SPBE.• Memperkuat kolaborasi lintas instansi (stakeholder).	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kepuasan Stakeholder Daerah.• Jumlah kebijakan daerah yang mengadopsi rekomendasi BSKDN-SPBE.• Jumlah kolaborasi lintas kementerian/lembaga.	<ul style="list-style-type: none">• Pusat Layanan Kebijakan Digital (Digital Policy Service Center).• Dashboard Kebijakan Dalam Negeri berbasis SPBE.• Kolaborasi strategis dengan Komdigi & Bappenas untuk integrasi data kebijakan publik.
4. Perspektif Keuangan & Tata Kelola (Financial & Governance)	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan efisiensi anggaran melalui digitalisasi proses kebijakan.• Meningkatkan nilai manfaat investasi teknologi SPBE di lingkungan BSKDN.• Menjamin akuntabilitas dan transparansi kebijakan digital.	<ul style="list-style-type: none">• Persentase efisiensi biaya proses kebijakan• Nilai maturitas akuntabilitas SPBE (Indeks SPBE $\geq 3,5$).• Persentase realisasi output SPBE sesuai perencanaan strategis.	<ul style="list-style-type: none">• Implementasi Digital Budget Monitoring Dashboard.• Audit Digital dan Tata Kelola Data SPBE.• Integrasi perencanaan dan pelaporan berbasis e-Planning & e-Monev Kemendagri.



Hubungan Kausal (Strategic Map Visual – Naratif)





Hubungan Kausal (Strategic Map Visual – Naratif)

1

Learning & Growth



Internal Process

Peningkatan kapasitas SDM dan budaya data mendorong perbaikan proses analisis kebijakan yang terintegrasi secara digital.

Human Capital



Digital Process Maturity

2

Internal Process



Customer

Proses kebijakan yang terdigitalisasi dan berbasis data menghasilkan rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan dapat diakses oleh pemda serta stakeholder nasional.

Process Excellence

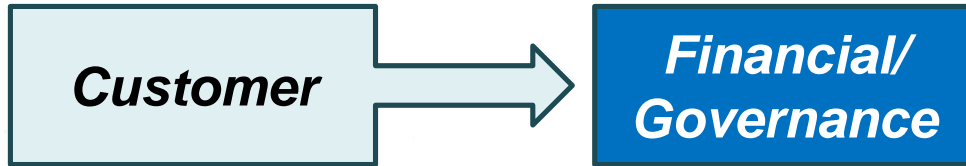


Policy Service Quality



Hubungan Kausal (Strategic Map Visual – Naratif)

3



Kepuasan pemda dan kolaborasi lintas instansi menghasilkan efisiensi anggaran, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas digital yang menjadi indikator keberhasilan SPBE



4



Hasil evaluasi kinerja SPBE dan feedback pengguna menjadi masukan untuk peningkatan kapasitas SDM dan inovasi kebijakan baru

Learning Cycle for Continuous Improvement



Rekomendasi Implementasi

1. Kelembagaan:

Bentuk Unit Transformasi Digital dan Data Governance di bawah Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM & Digitalisasi Pemerintah.

2. Arsitektur SPBE BSKDN:

Integrasikan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan dalam satu Policy Intelligence Platform yang terhubung ke Satu Data Kemendagri.

3. Manajemen Kinerja:

Gunakan dashboard berbasis BSC untuk memantau capaian KPI tiap perspektif secara real-time.

4. Governance Digital:

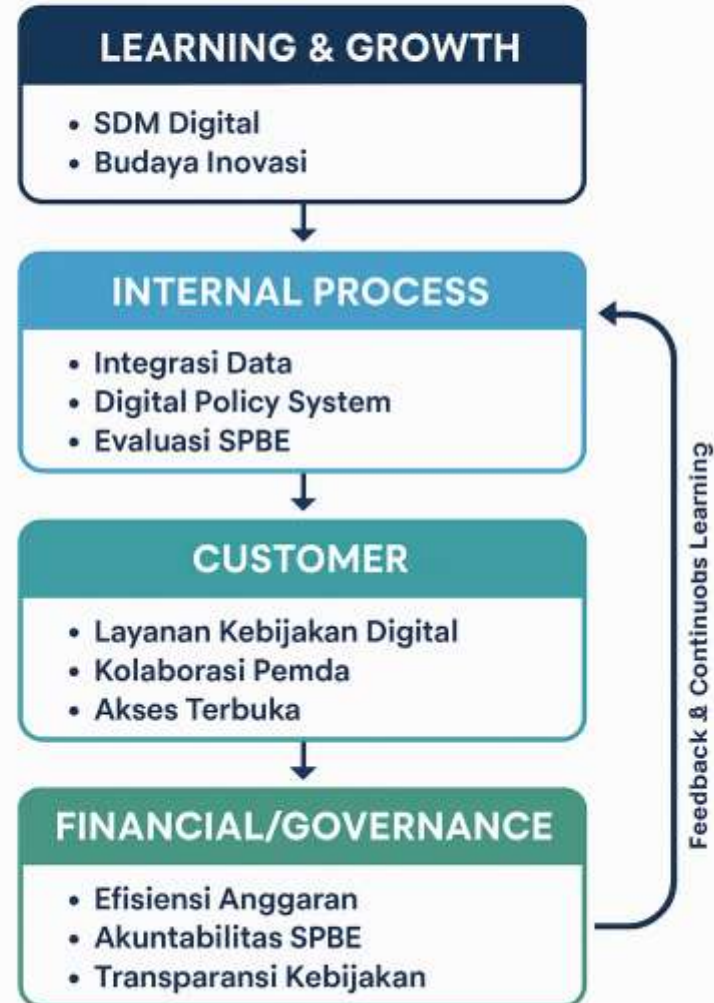
Terapkan prinsip Data Integrity, Interoperability, dan Transparency sebagai pilar SPBE BSKDN.

5. Capacity Building:

Adakan pelatihan Data-driven Decision Making dan Digital Public Policy bagi ASN BSKDN dan Pemda.



PETA STRATEGIS INTEGRASI BSKDN DENGAN SPBE





Konteks Strategis

BSKDN memegang mandat strategis untuk:

1. Melaksanakan analisis kebijakan berbasis data.
2. Menyusun rekomendasi strategi kebijakan dalam negeri.
3. Mengembangkan inovasi dan digitalisasi pemerintahan.

Sejalan dengan Permendagri No. 9 Tahun 2025, BSKDN melalui pusat-pusat strateginya memerlukan arsitektur data dan sistem informasi terpadu sebagai fondasi implementasi SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI)



Keterpaduan dan Berbagi Peran Berdasarkan Pusat Data

Pusat	Fokus Data Utama	Peran Strategis SPBE	Integrasi dalam Dashboard Satu Data
Pusat 1	Data fiskal, kemandirian daerah, dan kinerja pemerintahan daerah	Mendukung domain Manajemen Kinerja dan Evaluasi Pemerintahan Digital	Menyediakan indikator governance performance dan fiscal capacity index untuk Dashboard SPBE Kemendagri
Pusat 2	Indeks tata kelola, demokrasi, kerukunan, dan keamanan	Mendukung domain Kebijakan Publik dan Stabilitas Pemerintahan Digital	Integrasi dengan data BPS dan Bappenas untuk Policy Impact Dashboard
Pusat 3	Data keuangan daerah dan sektor publik (pendidikan, kesehatan, belanja)	Mendukung domain Efisiensi Keuangan dan Akuntabilitas Digital Pemerintahan	Sinkronisasi dengan SIPD, LKPD, dan Data Keuangan Daerah (BPKP)
Pusat 4	Indeks inovasi daerah, implementasi SIPD, dan indikator kinerja pemerintahan	Mendukung domain Inovasi dan Transformasi Digital Pemerintahan Daerah	Integrasi langsung dengan sistem SPBE daerah dan Innovation Tracking Dashboard



Integrasi dalam Penyusunan Peta Jalan SPBE BSKDN

Tahap	Fokus Integrasi	Output SPBE	Keterkaitan Fungsi BSKDN
Tahap 1: Inventarisasi dan Klasifikasi Data (2025)	Memetakan seluruh data dari Pusat 1–4, menilai keterbukaan dan format digital	Data Inventory Matrix	Fungsi koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan
Tahap 2: Arsitektur Data dan Metadata (2025–2026)	Menyusun standar metadata, interoperabilitas, dan skema pertukaran data antar pusat	Data Governance Blueprint	Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi berbasis data
Tahap 3: Pusat Data Terintegrasi (2026–2027)	Integrasi data ke Dashboard SPBE BSKDN sebagai pusat kendali analisis kebijakan digital	BSKDN Policy Intelligence Hub	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Tahap 4: Pemanfaatan Data untuk Kebijakan (2027–2028)	Pemodelan dan analitik prediktif (AI/ML) untuk mendukung penyusunan kebijakan	Decision Support System SPBE	Pemberian rekomendasi strategi kebijakan berbasis evidence
Tahap 5: Optimalisasi dan Inovasi Digital (2028–2030)	Pengembangan open data dan interoperabilitas penuh dengan portal Kemendagri	Dashboard Nasional Kebijakan Dalam Negeri	Pelaksanaan inovasi pemerintahan dalam negeri berbasis digital

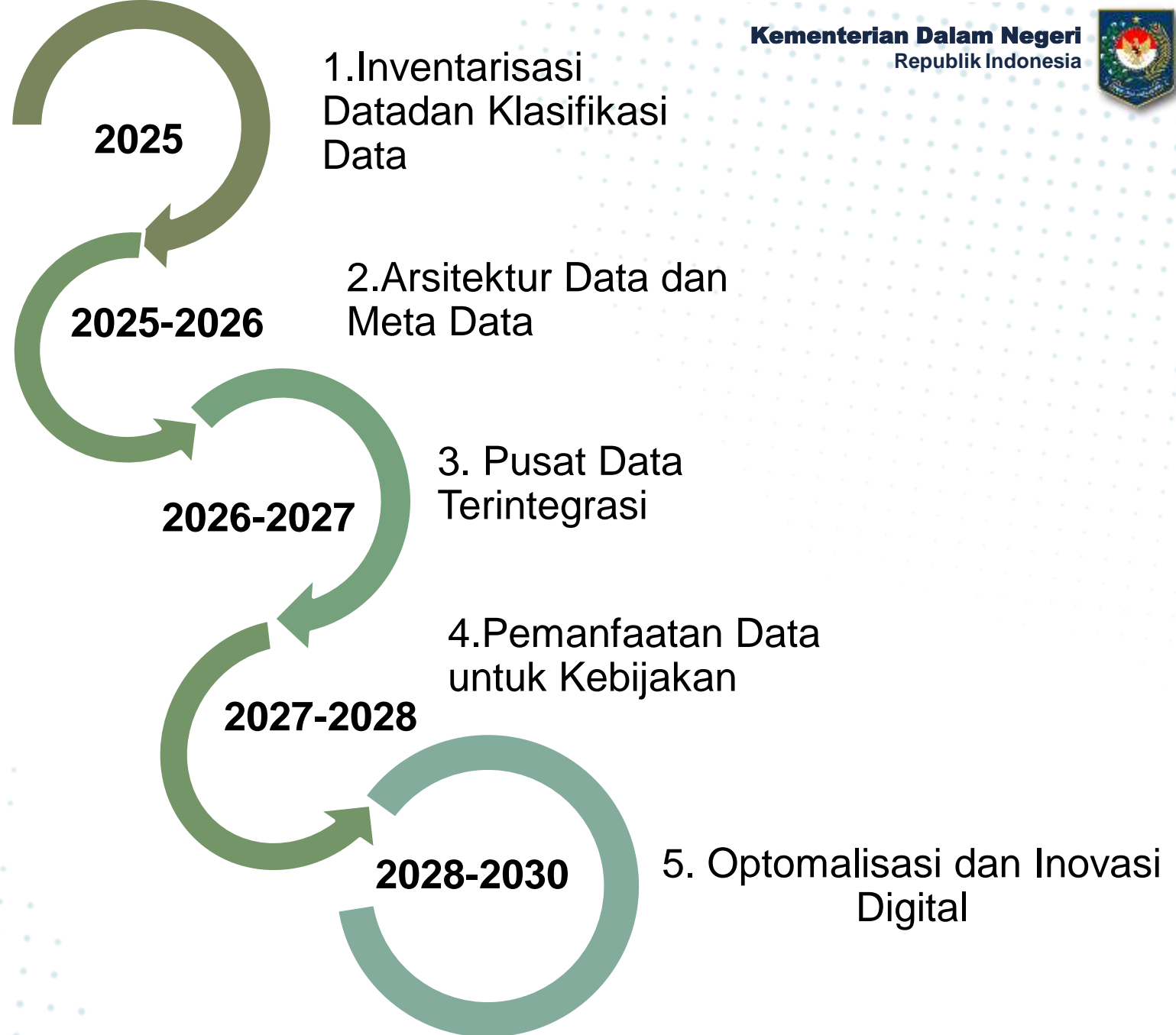


Keterkaitan SPBE – Satu Data – Dashboard Informasi

Dimensi	SPBE	Satu Data Indonesia	Dashboard Terintegrasi
Kebijakan dan Tata Kelola	Penguatan domain Manajemen Data dan Informasi Pemerintahan	Mengadopsi standar metadata, interoperabilitas, dan kode referensi nasional	Tata kelola data lintas pusat dan Unit Kerja Eselon 1 Kemendagri
Teknologi dan Infrastruktur	Integrasi platform SPBE BSKDN ke arsitektur Kemendagri	Konektivitas antar sistem berbasis API dan warehouse	Dashboard “One Policy Data”
SDM dan Kapasitas	Peningkatan kompetensi ASN dalam data-driven decision making	Tim pengelola data lintas pusat	Pengelola Dashboard SPBE lintas fungsi
Pemanfaatan Data	Pemodelan analitik kebijakan berbasis data terintegrasi	Validasi dan visualisasi data melalui portal publik	Informasi real-time untuk pimpinan dan publik



Peta Jalan SPBE BSKDN



Terimakasih

0818902033,
gunawan.priautama@budiluhur.a
c.id

